

## ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Basri Bado<sup>1</sup>, Andi Samsir<sup>1</sup>, Fazly Gazaly Bahansubu<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan

### ABSTRACT

*Economic growth quality become one of benchmarks for the community to judge governments performance in solving social problems. The aims of this research are to analyze the quality of economic growth and to find out how to overcome the social problems caused by high economic growth in South Sulawesi Province. This research use the Poverty-Equivalent Growth Rate method and employment absorption elasticity analyze method and also use secondary data from 2007-2017. The results of this research are during the research period, South Sulawesi Province tend not to have quality of economic growth. The sectors which should have high employment absorption, evidently have low employment absorption elasticity. This causes the economic growth quality still hard to achieve for South Sulawesi Province's government.*

**Keywords** : *Economic growth's quality, poverty, unemployment, inequality in income distribution*

Kualitas pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah di Indonesia kini menjadi tolak ukur utama bagi masyarakat untuk menilai baik buruknya kinerja pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak menjadi jaminan daerah tersebut bebas dari

masalah khususnya masalah sosial sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut dianggap tidak berkualitas.

Salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ialah Provinsi Sulawesi Selatan namun masih memiliki beberapa permasalahan sosial. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta angka

ketimpangan distribusi pendapatan pada hampir setiap daerah di Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi kabar baik bagi masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang “tidak diuntungkan” dalam perekonomian atau pertumbuhan yang tidak mendiskriminasikan serta mampu menciptakan pemerataan akses pertumbuhan (Amalina dkk, 2013). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pengukuran tingkat kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan yang diukur melalui jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran yang diukur dengan jumlah pengangguran terbuka, serta tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang dilihat dari angka rasio gini.

Salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum dapat menyelesaikan masalah sosial ialah adanya pola investasi yang belum berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu meningkatkan

investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja yang maksimal (Basri, 2016).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kualitas pertumbuhan ekonomi dan mengetahui cara menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi akibat adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua (data eksternal) berupa publikasi resmi instansi terkait (Badan Pusat Statistik, dll), buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta alat analisis yang digunakan yaitu:

#### 1. Metode Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)

Metode analisis yang dikembangkan oleh Klasen (Haryanto, 2016) digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran terbuka serta angka rasio gini di suatu daerah.

**A. Pertumbuhan Inklusif dalam menurunkan kemiskinan**

$$\mathbf{IGp = (Epg / Ep) Gg}$$

Di mana:

IGp: Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

EP: Elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

Epg: Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

Gg: Koefisien pertumbuhan ekonomi

**B.** Pertumbuhan Inklusif dalam menurunkan pengangguran

$$IGem = (Eem.g / Eem) Gg$$

Di mana :

IGem: Koefisien pertumbuhan inklusif dalam penyerapan tenaga kerja

Eem: Elastisitas penyerapan tenaga kerja

Eem.g: Elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

Gg: Koefisien pertumbuhan ekonomi

**C.** Pertumbuhan Inklusif dalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan

$$IGin = (Ein.g / Ein) Gg$$

Di mana :

IGin: Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan

Ein: Elastisitas ketimpangan terhadap pendapatan rata-rata

Ein.g: Elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi

Gg: Koefisien pertumbuhan ekonomi

**D.** Koefisien pertumbuhan ekonomi

$$Gg = Ln (PDRB1) - Ln (PDRB2)$$

Di mana :

Gg : Koefisien pertumbuhan ekonomi

PDRB1: Produk domestik bruto tahun sekarang

PDRB2: Produk domestik bruto tahun sebelumnya

Kriteria tingkat inklusifitas kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut:

-IGp > Gg artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mengurangi tingkat kemiskinan (pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap kemiskinan)

-IGem > Gg artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mengurangi tingkat pengangguran (pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap pengangguran)

-IGin > Gg artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan)

## 2. Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Metode ini digunakan untuk mengetahui besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi, dapat menggunakan metode analisis elastisitas kesempatan kerja. Menurut Khan (Robiansyah, 2015) mengatakan bahwa penduduk miskin dapat lepas dari kemiskinan ketika salah satunya yaitu adanya peningkatan kesempatan kerja.

$$Q^{\circ} = \frac{Q_t - Q_{t-1}}{Q_{t-1}} \times 100 \%$$

Ket:

$Q^{\circ}$  : Laju Pertumbuhan PDRB

$Q_t$  : Nilai PDRB pada tahun<sub>t</sub>

$Q_{t-1}$  : Nilai PDRB pada tahun<sub>t-1</sub>

Untuk mengetahui laju pertumbuhan tenaga kerja per sektor dapat menggunakan rumus berikut:

$$L^{\circ} = \frac{T_t - T_{t-1}}{T_{t-1}} \times 100 \%$$

Ket:

$L^{\circ}$  : Laju pertumbuhan tenaga kerja per sektor

$T_t$  : Tenaga kerja per sektor pada tahun<sub>t</sub>

$T_{t-1}$  : Tenaga kerja per sektor pada tahun<sub>t-1</sub>

Untuk mengetahui besarnya penyerapan tenaga kerja di suatu daerah, maka dapat menggunakan rumus elastisitas kesempatan kerja:

$$E = \frac{L^{\circ}}{Q^{\circ}}$$

Ket:

$E$  : Elastisitas penyerapan tenaga kerja

$L^{\circ}$  : Laju pertumbuhan tenaga kerja

$Q^{\circ}$  : Laju pertumbuhan PDRB

Kriteria dan kepekaan dari elastisitas kesempatan kerja dalam kaitannya dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan dengan kriteria sebagai berikut:

$E=0$  Tidak Elastis Sempurna, dimana perubahan PDRB tidak mengubah

pertumbuhan jumlah tenaga kerja walaupun pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan atau penurunan.

$E=$  Elastis Sempurna, dimana pertumbuhan jumlah tenaga kerja tetap terjadi walaupun tidak terjadi pertumbuhan PDRB.

$E=1$  Elastis Uniter, dimana apabila persentase pertumbuhan PDRB sebanding dengan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja.

$E>1$  Elastis, dimana apabila persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih besar daripada persentase pertumbuhan PDRB..

$E<1$  Tidak Elastis, dimana apabila persentase pertumbuhan PDRB lebih besar daripada persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja.

## Hasil dan Pembahasan

### Metode Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pertumbuhan inklusif) dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang dapat memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dikategorikan miskin, sebagai pihak yang paling tidak diuntungkan dalam pembangunan, memiliki kesulitan untuk memperoleh manfaat dari adanya pembangunan tersebut. Untuk menghitung tingkat inklusifitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat menggunakan

metode *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR).

Tabel 4.2 Hasil analisis model PEGR

Tahun	IGp	IGem	IGin	Gg
2007	0,05	0,10	0,05	-0,06
2008	0,05	0,04	0,05	0,20
2009	-0,11	0,03	-0,11	-0,22
2010	0,07	0,01	0,07	0,27
2011	1,43	0,01	1,43	-0,07
2012	0,07	0,01	0,07	0,15
2013	0,06	-0,03	0,06	-0,15
2014	0,06	0,04	0,06	-0,01
2015	0,05	0,00	0,05	-0,05
2016	0,07	0,05	0,07	0,03
2017	0,18	-0,01	0,18	-0,02

(Sumber: Hasil olah koefisien inklusifitas)

Ket:

IGp = Koefisien inklusifitas kemiskinan

IGem = Koefisien inklusifitas

pengangguran

IGin = Koefisien inklusifitas ketimpangan distribusi pendapatan

Gg = Koefisien pertumbuhan ekonomi

#### A. Kemiskinan

Dapat dilihat bahwa untuk inklusifitas kemiskinan, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang inklusif terhadap kemiskinan hanya pada tahun 2016. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien inklusifitas kemiskinan lebih besar daripada nilai koefisien pertumbuhan ekonomi.

Dapat dilihat pada tahun 2008, 2010, dan 2012 memiliki nilai koefisien inklusifitas kemiskinan bertanda positif namun tidak lebih

besar dari koefisien pertumbuhan ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut, pengurangan jumlah kemiskinan tetap terjadi namun hasil dari pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut masih dinikmati oleh sebagian besar masyarakat yang tidak tergolong miskin.

Koefisien pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai/bertanda negatif terjadi pada tahun 2007, 2011, 2013, 2014, dan 2017. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh penduduk tidak miskin. Pada tahun 2009, koefisien inklusifitas kemiskinan dan koefisien pertumbuhan ekonomi sama-sama bertanda negatif namun nilai koefisien pertumbuhan ekonomi lebih besar dari nilai koefisien inklusifitas kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah masyarakat miskin.

#### B. Pengangguran

Dapat dilihat bahwa inklusifitas pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi hanya pada tahun 2016. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien inklusifitas pengangguran lebih besar dari pada koefisien pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2008, 2010, dan 2012 memiliki nilai koefisien inklusifitas

pengangguran bertanda positif namun tidak lebih besar dari koefisien pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan jumlah pengangguran terbuka seiring dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi namun peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih cepat dibandingkan dengan penurunan jumlah pengangguran terbuka.

Nilai koefisien inklusifitas pengangguran dan koefisien pertumbuhan ekonomi bertanda negatif pada tahun 2013 dan 2017. Ini menandakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sejalan dengan peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Pada tahun 2007, 2009, 2011, 2014, dan 2015 nilai koefisien pertumbuhan ekonomi bertanda negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru bahkan meningkatkan pengangguran atau dapat dikatakan penurunan pertumbuhan ekonomi dapat memperparah jumlah pengangguran terbuka.

### C. Ketimpangan

Dapat dilihat bahwa inklusifitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi hanya pada tahun 2016. Ini dibuktikan

dengan nilai koefisien inklusifitas ketimpangan lebih besar dari pada koefisien pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2008, 2010, dan 2012 memiliki nilai koefisien inklusifitas ketimpangan bertanda positif namun tidak lebih besar dari koefisien pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan namun tidak lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Nilai koefisien inklusifitas ketimpangan dan koefisien pertumbuhan ekonomi bertanda negatif ada pada tahun 2009. Ini menandakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejalan dengan penambahan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Pada tahun 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, dan 2017 nilai koefisien pertumbuhan ekonomi bertanda negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi malah memperparah ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.

### **Metode Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja**

Metode analisis selanjutnya yang digunakan yaitu Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja. Analisis ini digunakan untuk

mengetahui besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi, dapat menggunakan elastisitas kesempatan kerja.

Tabel 4.3 Elastisitas PTK

Tahun	E(1)	E(2)	E(3)	E(4)	E(5)
2007	1,2	2,3	4,6	-1,7	4,2
2008	0,3	3,1	0,3	3,9	1,1
2009	-0,3	2,7	1,6	0,5	0,5
2010	-0,1	-1,0	-0,6	4,6	-0,6
2011	-0,9	1,7	1,1	2,0	1,8
2012	0,3	0,4	-0,3	0,3	0,4
2013	-0,3	-1,8	-0,3	0,5	0,1
2014	0,0	0,1	1,2	2,0	0,0
2015	-0,2	2,0	0,3	-1,7	0,7
2016	0,1	3,1	1,6	0,4	1,2
2017	-0,7	-1,0	-0,1	0,4	-0,4

(Sumber : Data olah elastisitas PTK)

Ket:

E(1) : Sektor pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan

E(2) : Sektor industri pengolahan (manufaktur)

E(3) : Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan & hotel

E(4) : Sektor jasa kemasyarakatan

E(5) : Sektor lain-lainnya

Dapat dilihat sektor pertama E(1) selama periode penelitian hanya pada tahun 2007 berada pada posisi elastis yang berarti bahwa perubahan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih besar daripada perubahan persentase pertumbuhan PDRB. Pada sektor kedua E(2) periode 2007-2017 bisa dikatakan cukup baik dimana pada tahun 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, dan 2016 berada pada kategori elastis yang berarti bahwa

perubahan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang diserap lebih besar daripada perubahan persentase pertumbuhan PDRB. Namun kondisi tersebut masih belum bisa dipertahankan mengingat pada tahun 2012 dan 2014 berada pada posisi tidak elastis dengan arah perubahan persentase pertumbuhan PDRB sebanding dengan perubahan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pada sektor ketiga E(3) periode 2007-2017 nilai yang diperoleh berfluktuatif. Pada tahun 2007, 2009, 2011, 2014 dan 2016 sektor ini berada pada posisi elastis sehingga pertumbuhan PDRB yang terjadi dapat mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2008 dan 2015 masih dikategorikan tidak elastis namun memiliki arah perubahan persentase pertumbuhan PDRB yang searah dengan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang diserap. Pada sektor keempat E(4), selama periode 2007-2017 tidak pernah berada di kategori elastis uniter. Namun terdapat 5 tahun dimana sektor tersebut dikategorikan sebagai tidak elastis yaitu 2009, 2012, 2013, 2016, dan 2017. Ini menunjukkan bahwa sektor tersebut belum dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. Dapat dilihat bahwa hanya pada tahun 2008, 2010, 2011, dan 2014 sektor tersebut berada pada kategori elastis.

Pada sektor kelima E(5), selama periode 2007-2017 hanya terdapat 4 tahun yang pernah dikategorikan sebagai sektor

yang elastis yaitu pada tahun 2007, 2008, 2011, dan 2016. Ini menunjukkan pada tahun tersebut persentase pertumbuhan PDRB yang terjadi menyebabkan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang diserap yang lebih besar. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, sektor ini dikategorikan sebagai tidak elastis sempurna. Hal ini berarti pada tahun tersebut meskipun terjadi perubahan pertumbuhan PDRB, tidak akan mengubah pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang diserap.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab sebelumnya tentang kualitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama periode tahun 2007-2017 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung belum dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien kemiskinan, koefisien pengangguran serta koefisien ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode penelitian cenderung lebih kecil dibandingkan dengan koefisien pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat menyelesaikan masalah sosial yang terjadi.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, salah satu

caranya yaitu dengan fokus pada penyerapan tenaga kerja sektor padat karya. Sektor-sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja cukup besar namun masih belum dapat memaksimalkan potensi penyerapan tenaga kerjanya pada tahun 2017 yaitu sektor pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, sektor industri pengolahan (manufaktur), sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan & hotel. Ini ditunjukkan dengan nilai elastisitas pada sektor-sektor tersebut lebih kecil daripada 1 ( $E < 1$ ).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hanya beberapa tahun saja sektor tersebut memiliki penyerapan tenaga kerja yang optimal ( $E > 1$ ). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat mempertahankan konsistensi dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menanggulangi timbulnya permasalahan sosial yang terjadi akibat tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki tingkat elastisitas rendah namun potensi penyerapan tenaga kerjanya cukup besar.

### **Daftar Pustaka**

Amalina, D. H., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. 2013. *Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia*



Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. *Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, II(2).

Astuti, P. B. 2016. Analisis Kurva Phillips dan Hukum Okun di Indonesia Tahun 1986-2016. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, XV(1).

Basri Bado. 2016. Analisis Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. *Ekonomi dan Pendidikan*, XIV(2).

Darman. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum Okun. *The Winners*, XIV(1).

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Sukidjo. 2009. Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri. *Ilmiah Pendidikan*, XXVIII(2).

Trianto, A. 2017. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntansi*, XIII(1).